



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERKEMBANGAN SIDANG KASUS GAZA OLEH INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Ziyad Falahi

Analisis Legislatif Ahli Muda
ziyad.falahi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

International Courts of Justice (ICJ) telah mengadakan persidangan atas perkara gugatan yang diajukan Pretoria pada tanggal 11-12 Januari 2024, setelah gugatan diajukan pada 29 Desember 2023. Pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berkedudukan di Den Haag dianggap beberapa negara, khususnya Afrika Selatan (Afsel), perlu mempertimbangkan agresi Israel yang dipandang merupakan tindakan melawan hukum berdasarkan Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Berbeda dengan pernyataan Anthony Blinken yang membuat sidang ICJ dianggap AS akan sia-sia, Turki dan Malaysia mendukung langkah Afsel tersebut.

Bahkan Bank Uni Eropa sejak berbulan-bulan sebelumnya melalui Cristine Lagarde mengharapkan tuntasnya kasus Israel-Palestina yang berkontribusi bagi stagflasi perekonomian. Konflik Gaza merupakan eskalasi konflik kedua yang menyita perhatian internasional, di saat bersamaan adalah invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu, harga bahan bakar mengalami turbulensi sebagai konsekuensi atas eskalasi perang, dan tingginya suku bunga menjadi penyebab melemahnya produktivitas, selain masalah manufaktur. Uni Eropa di bawah kepemimpinan Cristine Lagarde pernah menyampaikan suku bunga naik sebanyak empat kali setelah sempat minus sebagai *alarm* bahwa perang haruslah mempertimbangkan aspek finansial.

Di sisi lain *Abraham Accord* berpeluang dirundingkan ulang karena Maroko bersiap untuk menghapus normalisasi hubungan dengan Israel. Keluarnya Maroko setelah sebelumnya bersama dengan Sudan, Uni Emirat Arab, dan Bahrain dalam rangka menciptakan optimisme atas diplomasi Israel di kalangan Islam, berpotensi melahirkan efek *multiplayer* karena Arab Saudi kini mulai mempertimbangkan hubungannya dengan Israel. Duta Besar Arab Saudi untuk Inggris Pangeran Khalid bin Bandar menetapkan sejumlah syarat minimal yang harus dipatuhi Israel untuk dapat melakukan normalisasi. Oleh karena itulah supremasi Syech Mansour UEA yang memiliki peran sentral dalam *Abraham Accord* adalah determinan untuk mempersatukan agama-agama samawi.

Di sisi lain Pemerintah Indonesia mengharapkan de-eskalasi Konflik Gaza setelah serangan mendadak faksi berkuasa di Gaza pada 7 Oktober 2023. Namun, Israel memainkan doktrin terbaru dengan menuding beberapa negara menyembunyikan Hamas. Dengan begitu, maka diplomasi bebas aktif Indonesia berpotensi mendapat tantangan dari Israel.

Washington melalui Elizabeth Warren dan Lord Ahmad dari Wimbledon yang secara intensif mengutuk keras merupakan salah satu dari sekian proliferasi kekuatan parlemen dalam hubungan internasional. Di sisi lain, Erdogan memperingatkan Catatan Akmal Israel yang dengan sarkastis menyebut komandan-komandan Hamas layak dibunuh. Sehingga dapat diestimasi, Israel mendorong akselerasi ruang gerak bagi militansi untuk mencari negara berpenduduk muslim sebagai *safe house*.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu meminta kepada Pemerintah untuk terus mengamati situasi dan perkembangan konflik yang terjadi di Gaza. Dalam konteks ini, kepentingan warga Palestina yang menjadi korban dari agresi Israel harus mendapatkan perhatian. Secara khusus, Komisi I DPR RI juga perlu meminta kepada Pemerintah untuk dapat mengantisipasi gagalnya perundingan Abraham.

Komisi I DPR RI, dan juga melalui BKSAP, perlu menganalisis konflik yang terjadi sebagai sebuah prakondisi sebagaimana perang Arab-Israel 1947, dengan melakukan segala bentuk masukan sebagaimana fungsi pengawasan dan diplomasi parlemen kepada pemerintah, dan secara intensif juga melakukan pendekatan ke negara-negara Arab. Dengan demikian, maka konstelasi kontemporer memberi peluang bagi semakin asertifnya diplomasi parlemen tanpa melalui forum multilateral melainkan melalui figur anggota parlemen yang memiliki basis *voters* untuk mengedepankan diplomasi publik.

Sumber

Jakarta Post, 10 Januari 2024;

Kompas, 11 Januari 2024;

Rakyat Merdeka, 11 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024